

BABI

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Salah satu masalah Indonesia yang belum terpecahkan hingga kini adalah kekerasan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya. Kekerasan ini mencakup beragam bidang, mulai dari kekerasan negara terhadap demonstran, agraria, kebebasan berpolitik, pembunuhan, ekonomi hingga pribadi. Contohnya, mulai dari rangkaian kasus Demonstran 1997 (PRD-PDI), Pencaplokan Tanah Petani Cimacan dan Tapos, pembantaian G30S-PKI, Centuri hingga penghilangan nyawa aktivis seperti Munir (Elsam 2006; KPA 2009; Sumarwan, 2007; Kontras 2010; Maliki 1999; Lucas 2001; Hefner 2011). Hampir seluruh kasus kekerasan negara ini belum tuntas terselesaikan hingga kini, sementara kasus baru yang sejenis terus bermunculan. Kasus-kasus tersebut menjadi daftar sejarah panjang relasi kekerasan Negara terhadap rakyat, membentuk konflik laten yang terkadang mengeskalasi.

Salah satu kasus kekerasan negara terhadap rakyat, yang baru mengerucut menjadi konflik berbau SARA adalah seperti yang telah terjadi di Kota Padang. Konflik tersebut adalah antara Himpunan Tjinta Teman (HTT) dengan Pemerintah Kota Padang terkait pendirian gapura Hok Tek Tong di kawasan kota tua Pondok, jalan Kelenteng Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Adapun yang memicu gesekan antara Himpunan Tjinta Teman (HTT) dan Pemerintah Kota Padang terkait dengan Surat Perintah Bongkar Gapura Nomor 640/2.04/DTRTB-P.P/2012 tanggal

6 Februari 2012, perihal pembongkaran Gapura di Jalan Kelenteng. Pembangunan gapura Hok Tek Tong dilaksanakan atas inisiatif dari pihak Himpunan Tjinta Teman sebagai upaya awal dalam melanjutkan pembangunan atau upaya rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009. Dalam rangka memperlancar proses pembangunan gapura, pihak HTT mengajukan izin kepada walikota dan kepada pihak terkait seperti Dinas Perhubungan. Pembangunan gapura juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya memperindah kota tua kampung pondok sebagai salah satu destinasi wisata. Gapura memiliki papan nama Hok Tek Tong, hal ini tidak terlepas sebagai bagian dari nilai historis dan kultural Himpunan Tjinta Teman.

Surat perintah bongkar ini keluar setelah ada surat perintah penurunan merk Hok Tek Tong pada gapura oleh Walikota. Pada saat akan dilakukakn eksekusi penurunan merk hampir timbul kontak fisik antara anggota HTT dengan Satpol PP, sehingga untuk sementara penurunan merek tidak jadi dilakukan. Beberapa hari kemudian keluar lah surat yang menyatakan perintah bongkar gapura kepada Himpunan Tjinta Teman (HTT) yang disampaikan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagai perwakilan Pemerintah Kota Padang. Menjadi tanda tanya besar bagi Himpunan Tjinta Teman ketika pada awalnya hanya surat perintah menurunkan merk Hok Tek Tong namun kemudian keluar surat perintah bongkar gapura. Pihak HTT berusaha memperjuangkan keberadaan gapura dengan cara mencoba melakukan negosiasi terkait upaya pembongkaran. Pada hari H pembongkaran yang akan dilakukan oleh Satpol PP, bentrok pun tidak terelakkan lagi, kontak fisik dan saling hantam pun terjadi. Kondisi pada saat ini gapura sudah dirobohkan, namun ada perjuangan yang begitu cukup panjang dari masing-masing pihak dalam usaha mewujudkan kepentingannya sampai bermuara kepada cara penyelesaian secara litigasi.

Dengan permasalahan tersebut menimbulkan polemik yang berkepanjangan antara HTT dan Pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini terkait dengan pihak Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Terkait dengan berdirinya bangunan klenteng Hok Tek Tong menimbulkan berbagai wacana di tengah-tengah ruang publik. Seperti pernyataan yang dikeluarkan oleh Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Sumbar di Gedung DPRD Kota Padang, yaitu mendesak Pemerintah Kota Padang tidak tebang pilih menertibkan bangunan liar (bangli). Mereka mendesak Pemerintah Kota Padang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Himpunan Tjinta Teman (HTT) dalam pembangunan gapura dan rumah duka di kawasan Pondok.([http:// padang ekspres.com](http://padang.ekspres.com), tertibkan bangli tanpa pandang bulu, diakses 19 Juli 2011).

Mengingat pembangunan gapura Hok Tek Tong sebagai bagian dari upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang pasca gempa 30 September 2009 di Kota Padang, ditindaklanjuti secara beragam oleh masing-masing pihak. Pihak Himpunan Tjinta Teman (HTT) sebagai organisasi konvensional dalam melakukan pembangunan gapura sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Walikota, pengembangan wilayah pondok sebagai destinasi wisata juga menjadi prioritas dari berdirinya gapura Hok Tek Tong. Permasalahan yang muncul antara Himpunan Tjinta Teman dan Pemerintah Kota Padang terkait bangunan gapura dipicu oleh surat perintah pembongkaran gapura. Penyelesaian permasalahan pada akhirnya sampai pada proses litigasi. Ada hal yang menarik dalam permasalahan ini, yaitu penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menyelesaikan permasalahan. Kekerasan yang dimaksud salah satunya adalah dengan adanya penggunaan aparat

keamanan, Pemko mengerahkan satpol PP untuk membongkar gapura. Penggunaan aparat ini tentu tidak terlepas dari otoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang.

Pada tataran teoritis, kasus kekerasan negara terhadap rakyatnya, dapat dirangkum menjadi dua aliran pemikiran, yakni aliran pemikiran yang pro kekerasan dan aliran pemikiran Nir - kekerasan. Aliran pemikiran pro kekerasan, menganjurkan negara harus tampil sebagai kekuatan raksasa yang bersikap keras terhadap warganya. Negara Hobbesian menjelmakan diri sebagai Sang Leviathan yang menakutkan. Hanya dengan pengerahan teknik teror yang sistematis, negara bisa menundukkan warga untuk tidak saling bertarung sendiri di antara mereka. Tertib sosial terjaga, kehidupan harmonis tercipta (Garvey, 2010).

Weber menjelaskan negara adalah komunitas manusia yang (sukses) mengklaim memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Weber mengutip pernyataan yang dikemukakan Leon Trotsky “Setiap negara didirikan di atas paksaan”. Apabila tidak ada lembaga-lembaga sosial yang bereksistensi tanpa kekerasan, maka konsep negara tereliminasi. Kondisi yang muncul adalah anarki (Alfiandi, 2012). Namun, seperti telah disinggung diawal tulisan ini, cara-cara kekerasan justru menyebabkan konflik laksana bola salju, seiring waktu dan konteks, yang semakin membesar. Camara (2000) menyebut konflik kekerasan negara terhadap rakyatnya ini sebagai spiral kekerasan.

Di sisi lain, pemikiran pro kekerasan negara ini mendapat kritik dari aliran pemikiran Nir-kekerasan (non-violence). Aliran Nir kekerasan lebih mengedepankan cara-cara damai tanpa kekerasan. Penggagas dari aliran pemikiran ini adalah Martin Luther King, Gandhi, dan Dom Helder Camara (Trijono, 2007).

Penelitian yang dilakukan ini mencoba mengikuti argumentasi Dom Helder Camara (2000), bahwa penyelesaian konflik melalui kekerasan, justru akan berbuah kekerasan lain, yakni kekerasan tahap kedua yang dilakukan rakyat (berbagai elemen rakyat melawan), yang kemudian akan ditanggapi negara dengan kekerasan tahap tiga. Kekerasan pertama bersumber pada ketidakadilan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat. Alih-alih kekerasan berbuah kekerasan yang lebih massif ketimbang dapat didamaikan.

I.2. Rumusan Masalah

Berdirinya Gapura Hok Tek Tong (HTT) sebagai bagian dari perencanaan pembangunan kawasan Kelurahan Pondok pasca gempa 30 September 2009. Pembangunan gapura juga menjadi bagian dari perayaan 150 tahun organisasi konvensional Hok Tek Tong di Kota Padang. Bangunan gapura juga sebagai upaya menciptakan minat dan daya tarik para pengunjung luar daerah, mengingat kawasan pondok sebagai daerah destinasi wisata, di Kota Padang. Pembangunan gapura melalui proses perizinan yang dilakukan oleh pihak Himpunan Tjinta Teman terhadap walikota dan dinas terkait. Pada tahap selanjutnya muncul permasalahan antara Pemko dan HTT terkait perizinan. Permasalahan menjadi

semakin berlarut ketika keluar surat perintah bongkar gapura. Penyelesaian permasalahan antara Pemko dan HTT berujung pada penyelesaian secara litigasi.

Sehubungan dengan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana pendekatan kekuasaan yang mengedepankan kekerasan yang dilakukan eksekutif dapat menyelesaikan konflik Gapura Hok Tek Tong ?**

I.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji cara-cara penyelesaian (resolusi) Konflik Gapura Hok Tek Tong (HTT)

1.3.1 Tujuan Khusus

- a) Mendeskripsikan secara prosedural muncul dan mengeskalasinya konflik gapura Hok Tek Tong.
- b) Menjelaskan resolusi konflik pro kekerasan negara yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terhadap konflik Gapura Hok Tek Tong dapat dikatakan selesai.

I.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Akademis

Memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan khususnya bagi bidang yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi konflik.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Dijadikannya penelitian ini sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang berminat dalam bidang ini khususnya yang berhubungan dengan masalah konflik.
2. Bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi instansi (pengambil keputusan) terkait dalam hal yang berhubungan dengan konflik seperti dalam merumuskan kebijakan terkait penanganan konflik di ruang publik.

I.5. Tinjauan Pustaka

I.5.1. Kekuasaan dan Kekerasan

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu. Kesempatan (*chance* atau *probability*) merupakan satu konsep yang sangat inti dalam definisi Weber. Dalam definisi di muka, kesempatan dapat dihubungkan dengan ekonomi, kehormatan, partai politik atau dengan apa saja yang merupakan sumber kekuasaan bagi seseorang. Kesempatan seorang pejabat untuk melaksanakan kemauannya tentu lebih besar dibanding kesempatan seorang petani. Kekuasaan tidak selamanya berjalan lancar, karena dalam masyarakat pasti ada orang yang tidak setuju atau melakukan perlawanan, baik secara terbuka atau terselubung, terhadap kekuasaan. Bahkan menurut Amitai Etzioni, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk

mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi. (Santoso, 2002 : 163)

Menurut Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kekerasan di sini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Di satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di "dalam", dan di lain pihak, potensi menuntut untuk diaktualkan yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Pengertian "*actus*" di sini mencakup kegiatan, aktivitas yang tidak tampak (seperti berfikir, bermenung, serta kegiatan mental atau psikologis lainnya) serta kegiatan, tindakan, aktivitas yang dapat diamati/tampak. Inilah kiranya yang menjadi titik tolak dalam memahami kekerasan sebagai penyebab perbedaan antara yang aktual dan yang *potensia*. Pengandaian dasarnya ialah apa yang bisa atau mungkin diaktualisasikan, harus direalisasikan. Walaupun pada kenyataannya tidak semua *potensia* kemudian berkembang menjadi *actus*. (Santoso, 2001 : 168)

Dalam perspektif yang berbeda tentang kekerasan, Mahatma Gandhi memperkenalkan tiga jenis perjuangan tanpa kekerasan. Yang paling penting adalah *non-violence of the strong*, yang dilakukan dengan keyakinan akan kekuatan diri. Kemudian *non-violence of the weak*, yang dilakukan karena tidak ada senjata dan sumber daya lain yang diperlukan untuk melakukan pertempuran. Yang terakhir adalah *non-violence of the coward*, yang begitu saja menyerah karena lemah dan takut. Gandhi menganjurkan agar manusia yang berperang

memberi makna positif pada peperangan yang mereka lakukan, yaitu berperang untuk memperjuangkan sesuatu, bukan hanya menentang sesuatu. Gandhi juga berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu penyebabnya. Penyebab kekerasan terletak pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat di pihak lain. *Non-violence* adalah non-kooperasi dengan struktur yang salah, sementara pada saat yang sama mengusulkan dan mengerjakan struktur alternatif, kalau mungkin, bukan menentang aktor di pihak lain itu (Santoso, 2001: 92).

Kajian tentang kekuasaan dan kekerasan dimulai oleh Thomas Hobbes (1651) dalam bukunya yang berjudul *Leviathan*. *Leviathan* adalah hewan laut yang besar, menakutkan dan berkuasa atas makhluk lain dengan menggunakan kekerasan. Menurut Hobbes manusia bertindak atas dasar kepentingan diri dan menjadi fitrah manusia untuk berselisih dan bertengkar. Dengan keadaan ini tercipta suatu keadaan saling menghabisi satu sama lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, yang bermuara kepada semua lawan semua. Pada kondisi ini juga muncul kesadaran dari manusia untuk kehidupan yang aman dan damai, sehingga ada keinginan daripada manusia untuk menyerahkan hak nya kepada sekelompok orang dalam hal mengelola lingkungan sekitarnya dalam pencapaian tujuan kehidupan yang damai. Hal ini untuk menghindari keadaan yang lebih berbahaya lagi, karena keadaan saling sikut dengan cara kekerasan dapat menciptakan perang semua lawan semua. Kondisi siapa yang kuat dia yang menang, menjadi hukum rimba bagi sesama, hal ini tidak terlepas dari setiap penyelesaian perselisihan dengan cara kekerasan.

Beberapa pemikir, seperti Jhon Locke (1690), Montesquieu (1784), dan Rousseau (1762), melancarkan kritik terhadap Hobbes. Menurut Locke, kekuasaan bersifat terbatas, sehingga tidak seorang pun dibenarkan melakukan kekerasan untuk merusak orang lain dalam soal hidup mati, kesehatan, kemerdekaan, ataupun miliknya. Montesquieu memperkenalkan Trias Politica untuk menghindari despotisme atau kekuasaan yang sewenang-wenang, termasuk penggunaan kekerasan. Rousseau menolak anggapan Hobbes yang menyatakan kekerasan ada sejak semula dalam diri manusia. Menurut Rousseau kemajuan dalam bentuk peradaban lah yang membuat manusia melaksanakan kekerasan. (Santoso, 2002 : 95)

Rousseau menjelaskan bahwa Dunia dengan kebebasan mutlak adalah kehidupan liar di belantara ganas. Untuk menyingkirkan kebrutalan tersebut, individu-individu yang ada harus menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada otoritas tertentu “Inti dari gagasan kontrak social secara sederhana adalah setiap orang menempatkan dirinya di bawah otoritas tertinggi”, seru Rousseau dalam bukunya *The Social Contract* (1762). *Du Contract Social* sebagai awal dari paham demokrasi. Untuk mengilustrasikan kontrak sosial, mari kita bayangkan sebuah pulau tanpa otoritas negara. Pada awalnya semua manusia terlahir bebas di sana. Ada yang bertubuh kuat dan mampu memiliki senjata, namun ada juga yang lemah dan tak berpunya, di dunia tanpa otoritas, kaum yang kuat bebas merampas tanah dari kaum yang lemah. Mereka yang melawan dapat dibunuh seenaknya. Untuk mengakhiri kebuasan ini, orang-orang di sana lalu bersepakat membuat kontrak sosial dengan mendirikan negara. Negara berhak untuk menentukan

siapakah pemilik sebidang tanah tertentu. Walaupun hak untuk “menentukan kepemilikan tanah” diserahkan kepada Negara, namun hak untuk “menggarap tanah miliknya” tidak diserahkan kepada negara. Negara harus melindungi hak ini. Ia akan menghukum siapa pun yang merampas dan menggarap tanah milik orang lain. (Sudjatmiko, 2013 : 215-216)

I.5.2. Perspektif Teoritis (Teori Spiral Kekerasan)

Menurut Camara, siapapun yang menggunakan kekerasan tetap terbelit dalam kekerasan, ia tidak mendobrak sistem kekerasan yang menguasai dunia tetapi malahan memberinya bahan bakar sehingga membuatnya semakin kuat (Berndt, 2006). Kekerasan yang dilakukan negara dan kemudian dibalas dengan kekerasan oleh rakyat yang merasa tertindas dan ditekan ternyata menciptakan konflik di kemudian hari. Helder Camara yang berkebangsaan Brazil mencermati fenomena yang terjadi di negara berkembang yakni pada negara-negara dunia ketiga menekankan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pemegang otoritas/berkuasa justru akan melahirkan tindak kekerasan baru, seperti bara dalam sekam yang suatu waktu muncul ke permukaan. Kekerasan yang ditimbulkan ini kemudian memancing kekerasan baru dari kekerasan pertama, yang kemudian dapat melahirkan kekerasan baru selanjutnya sebagai bagian dari rangkaian yang tidak terpisahkan dari kekerasan sebelumnya, hal ini lah yang ia sebut sebagai “spiral kekerasan”. Mencermati fenomena sosial tersebut, Camara melihat ada tiga tahap kekerasan yang disebutnya kekerasan nomor 1 (satu), nomor 2 (dua), dan nomor 3 (tiga).

Kekerasan nomor 1 (satu) adalah pemantik/sumbu dan dilakukan oleh penguasa. Kekerasan ini lahir dari ego sektoral dari penguasa sebagai pemangku kebijakan yang melahirkan kebijakan untuk kepentingan penguasa. Kelompok penguasa identik dengan elit yang berusaha mempertahankan status quo yang mengabaikan semangat altruisme. Kebijakan yang dihasilkan bersifat menyusahkan rakyat yang biasanya ditunjukkan dengan adanya pembatasan-pembatasan, ketidakadilan demi ketidakadilan. Orang kecil sebagai korban hanya bisa mengikuti arus, tidak berdaya dan hanya berharap akan ada perbaikan terkait masa depan dan cenderung menerima keadaan sebagai suratan nasib.

Ada masa bahwa kekerasan nomor 1 (satu) ini mendapat perlawanan dari orang kecil yang menjadi korban dari setiap kekerasan, hal ini lah yang disebut sebagai kekerasan nomor 2 (dua). Perlawanan biasanya berasal dari perpaduan dua kelompok yaitu kelompok yang benar-benar tertindas dan kaum muda yang dikenal dengan semangat, ide serta kreativitasnya. Sikap berontak dari kelompok ini didasarkan atas pandangan bahwa dunia yang semestinya adalah dunia yang adil, sejahtera, dan manusiawi. Terkait dengan kehidupan yang adil, sejahtera, dan manusiawi tentu berbeda dari suatu bangsa ke bangsa lain, tergantung dari perspektif yang tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial, ekonomi, politik yang bersangkutan. Pada prinsipnya ada kesamaan pandangan dalam melihat ketidakadilan bukan sebagai nasib dan harus diterima begitu saja. Ketidakadilan yang ada terlahir dari ulah sekelompok elit yang haus kekuasaan yang tidak mengakomodir kepentingan orang di sekitarnya dalam konteks keadilan. Pada tahap ini kaum muda identik dengan idealisme, profesionalisme, integritas, dan

sikap kritisnya dalam melihat fenomena ketidakadilan. Kita ambil contoh seperti kasus diskriminasi ataupun pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Pada tataran perlawanan terhadap penguasa yang dilakukan oleh kaum tertindas dan kaum muda, biasanya penguasa bersifat acuh tak acuh dan penyelesaian masalah bersifat normatif.

Kekerasan nomor 2 (dua) sebagai akibat dari kekerasan nomor 1 (satu) didasari oleh motivasi ideologi atau agama. Pemberontakan pada kekerasan nomor 2 (dua) merupakan keresahan yang memuncak dan tidak dapat diterima oleh kelompok tertindas. Dalam hal ini penguasa memberikan label politik kepada pembangkang yang memberi komitmen kepada suatu ideologi (misal Marxisme) sebagai ekstrim kiri, sementara kepada mereka yang bermotivasi agama disebut ekstrim kanan (misal Gerakan Aceh Merdeka). Penguasa cenderung tanpa mau tahu dengan kritik dari pelaku kekerasan dan tanpa melihat akar persoalan pembangkangan oleh pelaku kekerasan. Kekerasan nomor 2 (dua) yang dilakukan penguasa sebagai bagian bentuk penyelesaian versi penguasa yaitu dengan segera menyebut mereka sebagai subversif, mempolitisir agama.

Sikap tidak terima atas perlakuan penguasa ditunjukkan dengan kekerasan nomor 2 (dua) terhadap kekerasan nomor 1 (satu) yang dilakukan oleh elit yang serakah dan haus kekuasaan. Perlawanan ditunjukkan dalam rupa konflik terbuka di jalan-jalan atau perang gerilya (misal Kasus Timor Timur), pada saat itu penguasa menjadi panik. Pada proses penyelesaian, penguasa beralih dengan alasan usaha mempertahankan ketertiban umum (law and order), yang bermuara kepada sikap tidak mencari jalan pemecahan konkret untuk mengetahui akar

permasalahan serta tidak membuka dialog terbuka. Sehingga jalan kekerasan kembali dipakai sebagai upaya nyata penyelesaian. Dengan sikap penguasa tersebut lahir lah kekerasan nomor 3 (tiga) dengan berbagai bentuknya. Untuk meredam perlawanan yaitu dengan cara memperoleh informasi, penguasa mentolerir teror mental (telepon gelap, rumah diamat-amati), penculikan, siksaan fisik. Para demonstran pro reformasi dikejar-kejar, tetapi demonstran pro status quo dibiarkan. Yang pasti, atas nama ketertiban umum dan kebebasan yang bertanggungjawab, pemerintah melalui perpanjangan tangannya melakukan berbagai cara represif.

Di Indonesia, kekerasan nomor 2 (dua) yang paling aktual terjadi pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Kekerasan yang dilakukan oleh negara mengatasnamakan stabilitas nasional dalam kenyataanya tidak menyelesaikan akar persoalan sesungguhnya dan justru melestarikan praktek-praktek penyimpangan oleh penguasa daripada menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kekerasan yang dilakukan negara dengan segala kerusakan pada infrastruktur dan para korban yang berjatuhan, malah tidak mengundang rasa bersalah dari pemerintah. Sikap otoriter pemerintah melalui alat negara ternyata tidak menyelesaikan permasalahan yang diselesaikan dengan cara kekerasan, nyatanya perlawanan semakin kuat (misal Insiden Trisakti). Mengapa rakyat berani berkorban menjadi korban kekerasan dan mau berhadapan dengan bedil dan sepatu lars? Sebab ketidakadilan, sebagai akar dari kekerasan, masih merajalela. Menurut Camara, keadilan merupakan prasyarat mutlak damai sejati. Maka menghilangkan kekerasan harus lebih dahulu menyelesaikan ketidakadilan.

Kasus yang paling nyata sebagai bentuk kekerasan negara terhadap rakyat adalah tragedi 1998. Dominasi penguasa pada rezim orde baru dengan sistem pemerintahan yang buruk, korupsi yang merajalela oleh penguasa beserta kroni-kroninya, kebebasan pers yang terkekang, keadaan perekonomian nasional yang buruk, menjadi titik jenuh bagi masyarakat. Kekerasan tidak hanya ditandai dengan kekerasan secara fisik, dapat juga secara terstruktur. Keadaan pada zaman orde baru mendapat perlawanan dari rakyat. Kekerasan 1 (satu) ditunjukkan dengan otoritarian pemerintah, kemiskinan, pengangguran, krisis moneter pada saat itu dimana pemerintah dianggap gagal dalam memerintah. Kekerasan ke 2 (dua) ditunjukkan dengan perlawanan dari rakyat dengan melakukan demonstrasi secara besar-besaran di jalanan. Menyikapi keadaan tersebut dengan alasan keamanan dan tertib sosial pemerintah bertindak secara represif dengan mengerahkan pasukan militer untuk mengamankan situasi. Kerusuhan menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk bertindak. Keadaan ini disebut sebagai kekerasan ke 3 (tiga). Kekerasan yang dilawan dengan kekerasan mengakibatkan kekerasan yang baru dan berkelanjutan. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Dom Helder Camara sebagai spiral kekerasan. (Bandingkan Dom Helder Camara)

Mengenai kekuasaan dan kekerasan dalam implementasi kebijakan publik dapat kita lihat melalui kasus Gapura Hok Tek Tong yang melibatkan pihak Pemerintah Kota Padang dan Himpunan Tjinta Teman. Pemerintah Kota Padang mengeluarkan perintah pembongkaran Gapura yang pada akhirnya menimbulkan polemik berkepanjangan. Kebijakan ini lahir tidak terlepas dari pemahaman aturan yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan

“Bumi dan Air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dikuasai oleh negara (pemerintah) dan untuk kemakmuran rakyat yang mana?

1.5.3. Penelitian Yang Relevan

Seperti termuat dalam artikel “Membaca konflik pertambangan dalam teori spiral kekerasan” tentang rencana tambang emas di Lembata semakin memanas, tarik menarik kepentingan antara pemerintah dan rakyat memuncak. Pada kasus ini dapat dilihat dari perspektif teori spiral kekerasan yang dikemukakan oleh Dom Helder Camara, seorang uskup dan pembela kaum tertindas dalam pergumulan dan refleksi keterlibatannya terhadap kasus-kasus structural.

Kekerasan terhadap rakyat di negara-negara miskin dan berkembang terjadi dalam sebuah spiral karena keberpihakan negara terhadap investor. Spiral ini berevolusi meningkat. Karena kedekatan negara mendukung investasi maka terjadilah spiral kekerasan itu. Rakyat dipojokkan dan ditempatkan sebagai korban. Pada tingkatan pertama, negara jadi penyebab/pelaku kekerasan kepada rakyat. Secara sepihak dan sewenang-wenang melahirkan kebijakan diskriminatif, tidak populis, tidak berpihak pada rakyat. Kebijakan yang umum di negara-negara miskin dunia ketiga adalah Pemimpin Negara memberi izin eksploitasi sumber daya alam yang berakibat pada perampasan sumber-sumber penghidupan rakyat. Berbagai aturan dibuat negara untuk melindungi kepentingan pemodal. Rakyat diabaikan bahkan ditinggalkan. Suara keberatan rakyat dibungkam, pejabat negara

lebih meluangkan waktu untuk menjamu para pemodal. Ini bentuk kekerasan pengabaian hak-hak rakyat.

Dengan kondisi diabaikan dan tidak dipedulikan, maka rakyat kemudian memilih menuntut keadilan, yang juga dalam banyak hal tidak didengar. Jika rakyat mengadu ke lembaga legislatifpun tidak tersalur. Hal ini yang menurut teori spiral kekerasan, semakin memicu kemarahan rakyat. Karena marah dan kesal, maka rakyat terjebak ke dalam tindak kekerasan. Demo dan aksi unjuk rasa damai bergulir ke keributan, huru hara dan pengrusakan. Gilirannya rakyat yang melakukan kekerasan tingkat kedua dalam spiral kekerasan dengan sasaran para pejabat dan fasilitas umum (negara).

Menanggapi aksi rakyat yang menjurus ke tindakan kekerasan (tingkat 2), maka dengan alasan keamanan serta kewibawaan kekuasaan dan kedaulatan negara, aparat negara diperintahkan untuk melakukan tindakan pencegahan. Aparat yang umumnya bersenjata disorong ke garis depan berhadap-hadapan dengan rakyat tanpa senjata. Dalam konfrontasi ini, terjadilah kekerasan tingkat ketiga atau kekerasan puncak. Rakyat yang sudah diabaikan hak-haknya dalam kekerasan tingkat pertama kembali menjadi korban keberingasan aparat bersenjata. Rakyat disapu bersih, ada yang dibunuh, diseret dan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak selesai di sini. Spiral kekerasan akan berevolusi ke babak berikutnya.

Ketika kekerasan demi kekerasan yang silih berganti ini sampai pada tingkat terakhir, pemerintah dengan seluruh kekuatan militer dan keamanannya

akan keluar sebagai pemenang. Ibarat pulang dari medan tempur, aparat negara akan berparade dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Inilah buah dari dominasi kekerasan negara atas rakyat.

Kekerasan tingkat ketiga/terakhir dalam spiral kekerasan ini memposisikan rakyat sebagai korban dan aparat negara sebagai pahlawan. Rakyat merupakan pihak subversif, penghalang pembangunan dan kemajuan. Pada titik ini demokrasi rusak total. Relasi pemerintah dan rakyat berantakan. Investor justru menikmati keuntungan. Jalan mulus ke bisnis dan penguasaan aset-aset kesejahteraan rakyat terbuka. Lalu rakyat semakin sengsara dan terpuruk.

Mencermati kasus ini dapat dilihat secara spesifik bentuk spiral kekerasan tingkat 1 (satu) yang dilakukan oleh negara dalam hal ini Bupati dan Ketua DPRD, Lembaga yang membuat perjanjian dengan PT. Pukuafu Indah. Tingkatan 1 (satu) berupa penandatanganan perjanjian yang sangat melukai hati dan hak-hak rakyat atas tanah-tanah warisan.

Terkait dengan sikap pemerintah, rakyat melakukan protes dan turun ke jalan melawan pemerintah, ini sebagai kekerasan tingkat ke 2 (dua). Menyikapi respon masyarakat, pemerintah melakukan pencabutan izin pengelolaan hutan, dan kemunculan preman-preman kecil di desa yang melempari rumah-rumah penduduk yang tidak setuju dengan tambang, hal ini sebagai bagian dari teror yang dilakukan terhadap masyarakat.

I.6. Metodologi Penelitian

I.6.1. Metode Penelitian dan Tipe Penelitian

Metodologi merupakan bagian epistemologi yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Metodologi juga dapat dipandang sebagai bagian dari logika yang mengkaji kaidah penalaran yang tepat. Jika kita membicarakan metodologi maka hal yang tak kalah pentingnya adalah asumsi-asumsi yang melatarbelakangi berbagai metode yang dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Asumsi-asumsi yang dimaksud adalah pendirian atau sikap yang dikembangkan para ilmuwan maupun peneliti di dalam kegiatan ilmiah (<http://www.infoskripsi.com>, sukses membuat proposal skripsi, diakses pada 11 Juni 2013)

Metode penelitian yang digunakan peneliti dengan pendekatan kualitatif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial yang ada. Hal ini sesuai dengan definisi kualitatif menurut Creswell (Silalahi, 2010: 77) yang menyatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah”.

Hal ini digunakan karena penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang penyelesaian konflik gapura. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian tipe ini dipilih karena penelitian deskriptif dapat

memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau gejala-gejala kelompok tertentu (Koetjaraningrat, 1990:66). Penelitian ini untuk memaparkan dan menggambarkan fenomena sosial secara kompleks sehingga relevansi sosiologisnya tercapai. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ada di sekitar data (Muhammad Nasir, 2003: 63-64)

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan mulai dari landasan pembangunan gapura, tahap pembangunan, gesekan antara Pemko dan HTT, jalur litigasi, sampai kepada pembongkaran gapura Hok Tek Tong. Untuk memperoleh informasi tersebut, perlu dipahami situasi sosial secara mendalam, sehingga metode penelitian kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian ini, karena memberikan gambaran yang terjadi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan gapura Hok Tek Tong. Sebelum penelitian, peneliti telah melakukan pencarian masalah berkaitan dengan konflik gapura Hok Tek Tong. Setelah itu melakukan penelitian langsung ke lapangan sebagai instrumen utama penelitian untuk melakukan kajian dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

I.6.2. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subyek penelitian yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Spradley (1997: 25-37) informan penelitian adalah orang

yang memberikan informasi yang baik tentang dirinya atau orang lain ataupun kejadian kepada peneliti. Untuk mendapatkan informan penelitian ada dua cara/mechanisme yang digunakan dalam ilmu sosial yaitu, pertama

Pengambilan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* (sengaja). *Purposive sampling* adalah penarikan informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tujuannya adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang dibangun. Berdasarkan informasi awal yang dimiliki oleh peneliti, kriteria informan yang diambil adalah informan yang terlibat langsung dengan permasalahan yang terjadi. Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif.

Tabel 1.1
Daftar Informan

No	Informan	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Asal	Alasan Pemilihan Informan
1	Rusli Hanura	43	S 1	Wiraswasta	Padang	Masyarakat Kampung Pondok
2	Nuzuir Syam	45	S 1	PNS	Padang	Kasi Pembangunan dan Penertiban Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (DRTB)
3	Albert Hendra Lukman	41	S 1	Wiraswasta	Padang	Bendahara Himpunan Tjinta Temana (HTT)
4	Suharyati	49	S 1	Guru	Solok	Aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
5	Erniwati	42	S 3	Dosen	Padang	Akademisi Universitas Negeri Padang (UNP)

Sumber : Peneliti

Dilihat dari tabel di atas pendidikan terakhir rata-rata S 1, informan Erniwati merupakan informan dengan pendidikan tertinggi dengan usia 42 tahun. Dalam proses wawancara, informan menggunakan bahasa Indonesia. Informan kebanyakan berasal dari Kota Padang.

1.6.3. Data yang Diambil

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber, yaitu :

1) Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi tidak terlibat. Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti mendapatkan data atau informasi-informasi penting sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari informan berupa alasan pembangunan gapura, bentuk upaya mengurus perizinan pembangunan gapura, kronologis konflik pembangunan gapura, upaya litigasi yang dilakukan oleh Himpunan Tjinta Teman dan Pemerintah Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian serta data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain data tentang deskripsi lokasi penelitian, dokumen terkait pembangunan Gapura Hok Tek Tong, seperti surat izin pembangunan, surat penolakan izin membangun, surat perintah bongkar, surat pengajuan litigasi, serta tulisan-tulisan koran dan website.

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2004:12), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya data yang melengkapi adalah data tambahan untuk kebutuhan penelitian seperti dokumen, foto, dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan-tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis (catatan lapangan), atau melalui rekaman dari tape recorder, rekaman video, dan sebagainya.

I.6.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2005 : 59). Sedangkan yang menjadi alat pengumpulan data dalam penelitian ini, pena, buku catatan, pensil dan perekam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan kajian dokumen.

a. Wawancara mendalam (indepth Interview)

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian guna mendapatkan informasi yang mendetail tentang masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa pihak terkait sebagai informan yang penulis lakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Sebelum wawancara,

peneliti menyiapkan *handphone* Nokia 6760 S sebagai perekam, alat tulis dan pedoman wawancara.

Wawancara yang digunakan terhadap Informan kunci adalah wawancara tak terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat atau merekam apa yang dikemukakan oleh informan. Selanjutnya hasil wawancara segera dicatat dalam transkrip wawancara untuk menghindari terjadinya bias karena adanya jeda waktu yang cukup lama.

Umumnya wawancara dilaksanakan di kantor maupun di rumah informan. Hal ini dilakukan agar sekaligus dapat dilakukan observasi langsung dengan informan. Dalam melakukan wawancara agar tidak terjadi kekakuan, dan demi terciptanya hubungan yang baik antara peneliti dengan informan, maka digunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan terkadang dengan bahasa Minang. Hal ini dilakukan agar terjadi komunikasi dua arah yang baik dan lancar.

b. Observasi (Observation)

Pengamatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pengamatan partisipatif pasif (*passive observation*). Stainback (Sugiono, 2010: 227) menyatakan:

“Passive observation means the research is present at the scene of action but does interact or participate”.

Dengan observasi ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu pada objek-objek dan aktifitas. Teknik pengumpulan data ini dilakukan karena peneliti lebih leluasa dalam mengamati kegiatan atau objek yang ada dalam mendapatkan data pendukung.

c. Kajian Dokumen (Study Documents)

Kajian dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari sejumlah dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, laporan dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

Kajian dokumen sangat penting dalam penelitian ini guna mengetahui proses pembangunan dan penyelesaian konflik gapura antara Himpunan Tjinta Teman dan Pemerintah Kota Padang berupa dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan daerah ataupun surat keputusan.

Mengenai teknik pengumpulan dan sumber data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dalam proses penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, ada beberapa perubahan terkait teknik pengumpulan dan sumber data, perubahan tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 1.3
Perubahan Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Konsep	Sumber Data	Instrument	Analisis	Alasan
Kekerasan No. 1 ➤ Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan ➤ Ahli	Primer Sekunder	Panduan Wawancara	Deskriptif Analisis	Walikota dan Kesbangpol mendelegasikan ke DRTB
Kekerasan No. 2 ➤ Himpunan Tjinta Teman ➤ LSM	Primer Sekunder	Panduan Wawancara	Deskriptif Analisis	HBT, Wartawan tidak ada konfirmasi mengenai jadwal wawancara. Mengingat bahwa sumber kekerasan ke dua adalah HTT
Kekerasan No. 3 ➤ Kekerasan ➤ Pembongkaran ➤ Pengadilan ➤ Tokoh Masyarakat	Primer Sekunder	Panduan Wawancara	Deskriptif Analisis	

1.6.5. Unit Analisis

Dalam suatu penelitian unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain subyek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga, (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis yaitu kelompok, yakni pihak Himpunan Tjinta Teman (HTT) dan Pemerintah Kota Padang.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas yang terus menerus dalam melakukan penelitian. Analisis data merupakan pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori (Afrizal, 2005:54).

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat di lapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (*field note*).

Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan, dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

1.6.7. Definisi Operasional

- 1) Konflik adalah suatu pertentangan kepentingan antara individu atau kelompok
- 2) Kekuasaan adalah kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun mendapatkan tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu
- 3) Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang dalam upaya mencapai tujuan dengan memberi tekanan secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok karena adanya kepentingan yang berbeda.

1.6.8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Klenteng, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dimana penulis akan mendatangi informan ke kediamannya atau tempat kerjanya, maupun tempat lainnya yang memungkinkan dilakukan wawancara dan untuk mencari informasi yang dibutuhkan dapat tercapai, sehingga relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

1.6.9. Proses Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dalam periode Juli-September 2013. Sebelum sampai pada tahap penelitian tersebut ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh peneliti untuk sampai pada penelitian lapangan.

Tahap pertama peneliti mendiskusikan topik penelitian dengan Sekretaris Jurusan Sosiologi. Setelah mendapatkan bimbingan, arahan maupun masukan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, peneliti mengajukan Term of Reference (TOR) ke Jurusan Sosiologi yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada tanggal 14 Mei 2013 Fakultas ISIP mengeluarkan surat penunjukan dosen pembimbing skripsi. Peneliti mengikuti bimbingan proposal untuk mendiskusikan topik penelitian serta untuk meminta arahan maupun masukan dari dosen pembimbing. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013 peneliti mengikuti ujian seminar proposal. Setelah ujian proposal peneliti melakukan bimbingan perbaikan proposal pada dosen pembimbing.

Tahap kedua, setelah mengikuti ujian seminar proposal, peneliti mengurus surat izin penelitian ke Fakultas pada tanggal 17 Juli 2013 dan kepada pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) pada tanggal 26 Juli 2013 untuk memperoleh surat rekomendasi penelitian. Surat rekomendasi penelitian kemudian diserahkan penulis ke Kantor Kelurahan Kampung Pondok, Pihak Himpunan Tjinta Teman, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Dengan berbekal surat penelitian dan data-data yang dimiliki, penulis mulai turun ke lapangan untuk mendapatkan data sekunder dan melakukan wawancara.

Pada proses pengumpulan data pada tahap wawancara, peneliti menggunakan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan terhadap 6 informan, informan ini terdiri dari pihak Himpunan Tjinta Teman (HTT), Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (DRTB), masyarakat Kampung Pondok, Aktivis LSM, dan Akademisi. Penulis dalam melakukan wawancara terlebih dahulu membangun komunikasi dengan informan. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung tempat kerja, rumah, atau tempat lain yang sudah dijanjikan oleh informan.

Wawancara dengan pihak Himpunan Tjinta Teman (HTT) dilakukan di sekretariat Badan Pengurus Harian Himpunan Tjinta Teman (HTT) yang diwakili oleh Bendahara HTT Albert Hendra Lukman. Wawancara dengan pihak HTT dilakukan peneliti dengan cara mendatangi langsung kantor sekretariat Badan Pengurus Harian (BPH) HTT. Wawancara ini dilakukan pada sore hari sekitar pukul 14:35 WIB. Setelah selesai wawancara, peneliti selanjutnya meminta dokumen yang berkaitan dengan pembangunan gapura, upaya litigasi. Informan menjanjikan kepada peneliti untuk datang beberapa hari kemudian, mengingat informan harus mengecek kembali arsip terkait konflik pembangunan gapura. Di sisi lain pada saat yang bersamaan, informan juga dalam keadaan sibuk, karena harus mempersiapkan perayaan hari lahirnya Himpunan Tjinta Teman (HTT) di Kampung Pondok. Dengan keadaan ini peneliti begitu cukup lama untuk memperoleh dokumen yang nantinya akan dianalisis.

Wawancara dengan pihak Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (DRTB) dilakukan di ruangan Nuzuir Syam selaku Kasi Pembangunan dan Penertiban. Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah terlebih dahulu mengajukan surat

rekomendasi penelitian kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (DRTB). Wawancara dilakukan pada siang hari sekitar pukul 11:40 WIB. Selanjutnya peneliti berusaha untuk meminta dokumen terkait pembangunan gapura Hok Tek Tong, penulis mendatangi bagian Tata Usaha DRTB namun dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian tidak ada sama sekali. Beberapa hari kemudian penulis mendatangi kembali Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan untuk meminta kembali dokumen yang terkait dengan pembangunan gapura, namun hasilnya tetap sama bahwa dokumen yang berkaitan dengan pembangunan gapura Hok Tek Tong tidak ada.

Wawancara dengan salah satu masyarakat Kampung Pondok, dalam hal ini dengan Rusli Hanura terlebih dahulu penulis membuat janji kemudian mendatangi langsung narasumber. Wawancara dilakukan pada siang hari sekitar pukul 12:55.

Wawancara dengan aktivis PBHI dilakukan di rumah informan setelah terlebih dahulu membuat janji. Wawancara dilakukan pada malam hari sekitar pukul 20:40. Pada wawancara dengan informan, penulis memperoleh data tentang bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap warganya, peneliti terbantu dengan adanya data tersebut.

Wawancara bersama informan Erniwati dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung tempat kerja setelah terlebih dahulu membuat janji. Wawancara dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09:15 WIB. Selama proses wawancara berlangsung, penulis mendapatkan beragam masukan terkait dengan topik penelitian.

Wawancara dilakukan peneliti dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada informan serta menyampaikan maksud dan tujuan. Peneliti berupaya membangun kearaban terhadap informan agar percakapan yang terjadi tidak kaku dan bersifat santai. Secara umum selama proses wawancara berlangsung, penulis berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi yang ada pada saat wawancara berlangsung.

1.6.10. Jadwal Penelitian

Tabel 1.4
Jadwal Kegiatan Penelitian Mei 2013 - Maret 2014

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan										
		M e i	J u n i	J u l i	A g u s	S e p t e m b e	O k t o b e	N o v e m b e r	D e s e m b e r	J a n u a r i	F e b r u a r i	M a r t
1	TOR Penelitian	■										
2	Keluar SK Pembimbing dan Bimbingan proposal		■									
3	Ujian Seminar Proposal dan perbaikan proposal		■									
4	Penelitian			■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Analisis data dan penulisan Skripsi			■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Ujian Skripsi											■

Sumber : Peneliti